

**PERAN GREENPEACE DALAM MENGATASI ISU DEFORESTASI DI  
PAPUA**



*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional*

**Oleh:**

**RIDHA WAHYUNI RAKHMAN**

**E 131 15 007**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS HASSANUDIN**

**2022**

**PERAN GREENPEACE DALAM MENGATASI ISU DEFORESTASI DI  
PAPUA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**RIDHA WAHYUNI RAKHMAN**

**E13115007**

**Pembimbing:**

**Agussalim, S.IP, MIRAP**

**Aswin Baharuddin, S.IP, M.A**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS HASSANUDIN**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN GREENPEACE DALAM MENGATASI ISU  
DEFORESTASI DI PAPUA

NAMA : RIDHA WAHYUNI RAKHMAN

NIM : E13115007

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 29 Agustus 2022



Mengetahui :

Pembimbing I,

Agussalim, S.IP, MIRAP  
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II

Aswin Baharuddin, S.IP, MA  
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

H. Darwis, MA., Ph.D.  
NIP. 196201021990021003

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi Ilmu Hubungan Internasional yang berjudul Peran Greenpeace dalam Mengatasi Isu Deforestasi Di Papua ini sepenuhnya adalah karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya merupakan duplikasi dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya tulis ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Makassar, 25 juli 2022

Yang membuat pernyataan,

  
METERAI  
TEMPEL  
9DAJX957042423  
Ridha Wahyuni Rakhman

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....   | ii   |
| HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....   | iii  |
| KATA PENGANTAR.....   | iv   |
| ABSTRAK .....   | vii  |
| ABSTRACT.....   | viii |
| DAFTAR ISI.....   | ix   |
| DAFTAR TABEL .....  | xi   |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>   |      |
| 1.1. Latar Belakang.....  | 1    |
| 1.2. Batasan Penelitian.....  | 10   |
| 1.3. Rumusan Masalah .....  | 10   |
| 1.4. Tujuan Penelitian.....   | 10   |
| 1.5. Manfaat Penelitian.....  | 11   |
| 1.6. Kerangka Konseptual.....   | 11   |
| 1.7. Metode Penelitian.....   | 19   |
| <b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>   |      |
| 2.1. Peran NGO .....  | 22   |
| 2.2. Konsep Deforestasi.....  | 29   |
| 2.3. <i>Literature Review</i> .....   | 33   |
| <b>BAB III    GREENPEACE DAN PERMASALAHAN HUTAN DI PAPUA</b>                      |      |
| 3.1. Sejarah Greenpeace .....   | 38   |
| 3.2. Prinsip Dasar Greenpeace.....  | 43   |
| 3.3. Greenpeace Indonesia.....  | 53   |
| 3.4. Permasalahan Hutan di Papua .....  | 55   |
| <b>BAB IV    PERAN GREENPEACE DALAM MENGATASI ISU<br/>DEFORRESTASI DI PAPUA</b>   |      |
| 4.1. Strategi Greenpeace dalam Mengatasi Isu Deforestasi di<br>Papua.....         | 65   |
| 4.2. Dampak Strategi Greenpeace dalam Mengatasi Isu Deforestasi<br>di Papua ..... | 77   |

**BAB V PENUTUP**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>5.1. Kesimpulan</b> ..... | 79 |
| <b>5.2. Saran</b> .....      | 80 |

**DAFTAR PUSTAKA**

## **ABSTRAK**

**RIDHA WAHYUNNI RAKHMAN, E 131 15 007.** Skripsi yang berjudul “Peran Greenpeace dalam Mengatasi Isu Deforestasi di Papua” dibawah bimbingan **Agussalim, S.IP, MIRAP** selaku pembimbing I dan **Aswin Baharuddin, S.IP, M.A** selaku pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

penelitian ini dilatarbelakangi oleh laju deforestasi wilayah tutupan hutan di Papua yang terus terjadi dan menjadi isu lingkungan secara lokal dan global. Hal ini dikarenakan pengalihan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan-perusahaan komersil yang berasal dari luar negeri. Dalam kajian ilmu hubungan internasional isu lingkungan telah menjadi salah satu fokus utama dalam permasalahan global yang harus secepatnya diatasi dan deforestasi hutan di wilayah Papua telah menjadi isu lingkungan yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat adat local dan akan berpengaruh pada sumber daya Negara Indonesia jika terus berlanjut. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Greenpeace dalam mengatasi isu deforestasi hutan di wilayah Papua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatif dengan teknik telaah Pustaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Greenpeace antara lain adalah: menyediakan data dan jasa dalam menganalisis laju deforestasi hutan di Papua, menerbitkan Stop Baku Tipu!, melakukan kampanye, memberikan sosialisasi berkala kepada masyarakat adat Papua, dan bekerjasama dengan BBC untuk mengekspos perusahaan-perusahaan kelapa sawit di wilayah Papua.

**Kata Kunci : Papua, Deforestasi, isu lingkungan, Greenpeace.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam era globalisasi yang terus berkembang dan mengubah dunia, lingkungan hidup pun mendapatkan dampak dari perkembangan ini. Manusia sebagai makhluk hidup yang memegang peran penting dalam perkembangan globalisasi sangat membutuhkan dan bergantung kepada lingkungan hidup di sekitarnya, begitu juga sebaliknya, lingkungan hidup membutuhkan manusia sebagai faktor penggerak untuk pertumbuhan yang dibutuhkan dan juga untuk mengatasi isu-isu yang muncul seiring dengan perkembangan globalisasi yang akan terus terjadi (Oosthoek & Gills, 2008).

Manusia telah menyadari dan memperhatikan isu-isu lingkungan yang terus bermunculan, hal ini dikarenakan dampak-dampaknya yang telah mencapai skala global sehingga membutuhkan solusi untuk dapat diatasi secepatnya. Isu-isu yang menjadi perhatian ini seperti isu perubahan iklim, isu pencemaran air, isu pencemaran udara dan juga degradasi hutan (Dodds & Pippard, 2005).

Isu lingkungan sebenarnya telah lama mendapatkan perhatian dunia, hal ini dapat dilihat dari beberapa fase yang diungkapkan Jan Oosthoek dan Barry K. Gills dalam buku *The Globalization of Environmental Crisis*. Fase pertama dimulai pada tahun 1950-an Ketika kekhawatiran tentang penggunaan bahan



kimia dalam bidang pertanian dan undang-undang komprehensif pertama untuk memerangi polusi udara diperkenalkan di Inggris dan Amerika Serikat. Fase kedua dimulai pada akhir 1960-an, Ketika banyak publikasi menyuarakan keprihatinan tentang degradasi lingkungan bumi yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang tidak terkendali. Kepedulian krisis lingkungan memuncak pada tahun 1970-an dengan kekhawatiran akan berkurangnya sumber daya yang tidak dapat dihindari, peningkatan degradasi lingkungan, dan kemungkinan berujung pada runtuhnya peradaban global (Oosthoek & Gills, 2008).

Kekhawatiran-kekhawatiran diatas menjadi alasan kuat bagi masyarakat di berbagai negara panik dan mendorong pemerintah di Negara masing-masing untuk memperkenalkan langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan dalam memerangi polusi udara dan air lokal atau regional serta kontaminasi tanah. Selanjutnya, langkah-langkah diambil demi ekonomi yang lebih hemat energi, isu mendesak berlanjut setelah isu krisis energi pada tahun 1973 sampai tahun 1979. Fase kedua ini tiba-tiba berakhir Ketika pada awal 1980-an, para ilmuwan mulai mengamati tanda-tanda bahwa aktifitas manusia secara signifikan berpengaruh pada lingkungan hingga tingkat global.

Dalam hubungan internasional isu lingkungan juga telah dianggap sebagai fitur politik internasional yang merupakan salah satu dampak globalisasi. Globalisasi membawa era yang baru bagi dunia dengan

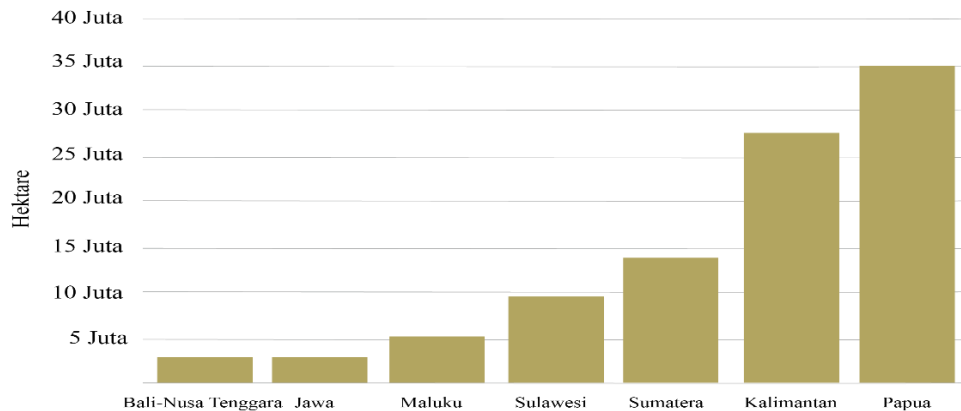
berkembangnya masalah yang telah melewati batas-batas negara, dimana Globalisasi menghasilkan perubahan yang lebih efisien dan efektif dalam setiap individu untuk menjalin Kerjasama dengan individu lainnya di belahan dunia yang lain. Masalah lingkungan dianggap sebagai isu internasional ditandai dengan diselenggarakannya *The United Nation Conference on The Human Environmental* di stockholm pada tahun 1972. Dalam konferensi ini PBB memutuskan untuk menimbang perlunya pandangan Bersama dan prinsip-prinsip bersama untuk menginspirasi dan memberi pedoman kepada masyarakat Global dalam pelestarian dan peningkatan lingkungan hidup (UNITED NATIONS, 1973).

Sebelum era globalisasi isu lingkungan terbagi menjadi dua isu tradisional yaitu konservasi sumber daya alam dan kerusakan akibat pencemaran (Baylis et al., 2008). Sedangkan dalam era globalisasi isu lingkungan bertambah tidak hanya mengenai kedua masalah sebelumnya yang telah disebut namun juga bertambah dengan masalah seperti di wilayah laut dengan menipisnya stok ikan, di wilayah hutan dengan berkurangnya daerah tutupan hutan, di wilayah daratan dengan degradasi tanah; polusi dan kelangkaan air; degradasi pesisir dan laut; kontaminasi orang, tumbuhan, dan hewan oleh bahan kimia dan zat radioaktif; dan yang paling sering dibahas saat ini yaitu perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut (Matthew et al., 2010).

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada isu degradasi hutan, terkhusus dalam isu deforestasi yang menjadi faktor akan terjadinya degradasi daerah tutupan hutan Indonesia. Hutan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian adalah dua wilayah hutan di Papua yaitu hutan di kabupaten Boven Digoel dan hutan di kabupaten Merauke.

Hutan Papua telah mendapatkan pengakuan dunia sebagai salah satu paru-paru bumi dengan daerah tutupan hutan yang masih sangat luas. Berdasarkan laporan tahunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Total luas daerah tutupan hutan di Papua mengambil 25 persen dari luas hutan di Indonesia (Purba et al., 2019). Indonesia adalah negara besar yang mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan, dan Kawasan Hutan. Pulau Papua Merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam angka ini Bersama pulau Kalimantan dan Sumatera (Agung et al., 2018).

Luas Tutupan Hutan Indoensia Per Pulau (2020)



(sumber : Status Hutan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018 )

Sumber daya hutan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Papua yang sangat bergantung pada hutan alam. Kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan hutan menjadi nilai tersendiri untuk masyarakat adat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang didapatkan berdasarkan kebutuhan dan pengalaman empiris sesuai aturan-aturan adat yang berlaku. Meskipun demikian, kemegahan hutan alam di tanah Papua tidak pernah lepas dari ancaman deforestasi dan degradasi. Industri-industri ekstraktif berbasis lahan secara massif terus mengkonversi hutan alam yang mengakibatkan hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat adat local dan juga habitat bagi satwa-satwa endemik di wilayah hutan Papua (Franky & Morgan, 2015).

Faktor utama penyebab terus menerus terjadinya deforestasi di wilayah hutan Papua adalah konvensi daerah tutupan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Ekspansi skala besar perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersil yang produksinya sangat masif dan global. Deforestasi wilayah hutan di Papua telah berlangsung Selama dekade terakhir, berbagai proyek kelapa sawit di berbagai daerah di Papua seperti di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke (Cahyono et al., 2020).

Boven Digoel dan Merauke merupakan wilayah yang mengalami deforestasi sangat nyata. Ekspansi-ekspansi industri ekstraktif sumber daya hutan dan lahan sangat pesat dan juga perjuangan masyarakat adat wilayah

masing-masing menjadi alasan kuat bagi organisasi-organisasi pemerhati lingkungan untuk menjadikan kedua wilayah tersebut menjadi fokus utama dalam laporan perkembangan isu deforestasi di Papua (Barri et al., 2019).

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu anggota PBB berkewajiban memenuhi program-program pelestarian lingkungan hidup yang juga untuk memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan internasional sebagai upaya global mengenai perubahan iklim. Pemerintah Indonesia mengklaim dalam buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan NDC, dan memiliki target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen berdasarkan kemampuan sendiri (*unconditional*) dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan pendanaan internasional (*conditional*) dibandingkan dengan tanpa aksi (*business as usual*) pada tahun 2030 (Agung et al., 2018).

Untuk saat ini pemerintah telah mulai mengambil Langkah baru, untuk meningkatkan kelestarian hutan Indonesia, termasuk sistem sertifikasi hutan dan lacak balak (*chain of custody*) untuk menjamin legalitas kayu, penataan perijinan, penegakan hukum dan penguatan sistem produksi hasil hutan (Agung et al., 2018), namun usaha pemerintah tidaklah cukup dalam mengatasi isu deforestasi yang terus terjadi. Hal ini di karenakan pemerintah Indonesia

merupakan pihak yang memberikan izin pembukaan lahan dan juga kurang tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini dalam proses tersebut (Greenpeace Internasional, 2021).

Dengan munculnya berbagai isu lingkungan yang global dibutuhkan juga solusi global. Global yang di maksud di sini bukan berarti tanggung jawab perubahan lingkungan dibagikan secara merata di antara semua orang, atau bahwa dampak dari perubahan ini di distribusikan secara seragam di antara semua tempat. Sebaliknya, global mengacu pada hubungan antara perubahan lingkungan dan konsekuensi sosial dikelompok dengan tempat dan waktu yang jauh (Matthew et al., 2010). Pernyataan ini menjadi faktor munculnya Non-governmental Organizations (NGO) sebagai salah satu pihak untuk mengatasi isu lingkungan yang terjadi.

NGO merupakan institusi baru di dunia barat yang muncul sekitar tahun 1950-1960-an yang pada awalnya hanya mengurus bantuan kederewasaan. Bantuan pembangunan kepada NGO pada tahun 1970-an lahir bersama dengan mengalirnya bantuan asing dan utang, seiring dengan modernisasi pertumbuhan ekonomi negara dunia ketiga. Secara umum NGO di dunia barat dibedakan menjadi dua jenis. pertama, NGO yang berorientasi pada aksi atau program. Kedua NGO yang berfungsi sebagai lembaga donor. Jenis pertama merupakan NGO yang menjalankan programnya karena keprihatinan terhadap berbagai

masalah yang muncul dimasyarakat seperti isu hak asasi, manusia, lingkungan, perdamaian, keadilan dan lain sebagainya. sebagai contoh NGO pada jenis pertama ialah ICJ, ICVA, WWF dan juga Greenpeace. Pada jenis kedua, NGO sebagai lembaga donor yang khusus menyalurkan bantuan dana, mereka menghimpun dana dari usaha-usaha swadaya masyarakat, donatur perorangan, usaha komersial yang akan disalurkan kepada NGO bersangkutan. beberapa NGO jenis kedua yakni OXFA, NIVIB, HIVOS, CIDA (Serrano, 2019).

Dalam penelitian ini penulis memilih Greenpeace sebagai NGO yang dapat berperan besar dalam mengatasi isu deforestasi di wilayah hutan Papua dikarenakan peran aktif Greenpeace di daerah lain di Indonesia dan juga melihat bagaimana potensi Greenpeace sebagai Organisasi Internasional dapat membawa kesadaran global akan isu yang sedang di hadapi masyarakat Papua dan juga dampaknya.

Greenpeace merupakan salah satu *International Non-governmental Organization* yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan hidup. Greenpeace awalnya didirikan pada tahun 1971 oleh sekelompok aktivis yang berasal dari Vancouver, Canada. Dengan keyakinan bahwa setiap orang dapat melakukan perubahan, mereka berlayar menggunakan kapal tua, Phyllis Cormack dengan misi menyaksikan dampak buruk uji coba nuklir yang dilakukan Amerika Serikat di Amchitka, yang nantinya menjadi tonggak kesuksesan gerakan organisasi ini. Greenpeace mampu mengubah kebijakan

pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan percobaan senjata nuklir di pulau Amchitka dan memetakan kawasan itu sebagai kawasan lindung untuk burung-burung yang berhabitat di pulau tersebut (Wylar, 2008).

Pada awalnya, fokus utama kampanye Greenpeace hanya pada anti uji coba nuklir, namun melihat isu lingkungan hidup lainnya seperti perubahan iklim, eksploitasi sumber daya hutan dan laut, akhirnya memperluas kampanyenya menjadi perlindungan lingkungan secara global dan membuka kantor pusat di Amsterdam, Belanda. Greenpeace mempunyai 2,8 juta pendukung di seluruh dunia dan memiliki kantor regional di 41 negara (Wylar, 2008).

Pada tahun 2005 Greenpeace secara resmi memulai kampanye isu lingkungan hidup di Indonesia. Greenpeace Indonesia memfokuskan kampanyenya pada beberapa persoalan yakni persoalan kehutanan, energi, air, dan kelautan (Arief et al., 2020). Dengan fokus seperti yang telah disebutkan, salah satu isu lingkungan yang menjadi target kampanye Greenpeace di Indonesia adalah deforestasi hutan di wilayah Papua.

Akibat tingginya deforestasi dan degradasi yang masif dan berlanjut menjadikan Indonesia salah satu penyumbang emisi gas kaca dan Papua yang dulu mendapat predikat sebagai salah satu paru-paru dunia terancam eksistensinya. Dengan ini Greenpeace sebagai salah satu NGO yang bertugas dalam penanggulangan isu lingkungan berusaha mengambil tindakan agar



masyarakat dan pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat sebagai cara untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi.

Greenpeace telah aktif melakukan berbagai kampanye di Indonesia dan sekarang juga telah fokus terhadap isu eksploitasi hutan di Papua yang hasilnya di paparkan melalui situs web resmi Greenpeace yaitu Greenpeace.org dan juga berbagai platform media sosial mereka. Greenpeace percaya bahwa pemerintah Indonesia hanya berfokus pada keuntungan yang didapat negara melalui ekspansi perkebunan kelapa sawit namun tidak memperhitungkan kerugian ketika terjadi kerusakan lingkungan (Cahyono et al., 2020). Namun Greenpeace percaya bahwa ada solusi yang dapat mengurangi kerusakan lingkungan hidup yang sangat berpengaruh tidak hanya pada masa depan sumber daya alam Indonesia namun juga dunia.

## **1.2. Batasan Penelitian**

Demi memudahkan pengumpulan data dalam penelitian maka peneliti mengambil jangkauan tahun studi kasus guna mempersempit Batasan materi yang akan digunakan, yakni pada tahun 2015 ketika isu deforestasi menyentuh angka tertinggi di wilayah hutan Papua hingga tahun 2020 ketika Greenpeace bekerja sama dengan BBC mengeluarkan video bukti nyata deforestasi di hutan Papua.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan, penulis menarik rumusan masalah berupa:

- 1.3.1. Bagaimana strategi Greenpeace dalam mengatasi isu deforestasi hutan di Papua?
- 1.3.2. Bagaimana dampak solusi strategi Greenpeace dalam mengatasi deforestasi hutan di Papua?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- 1.4.1. Menganalisis strategi Greenpeace dalam mengatasi isu deforestasi hutan di Papua
- 1.4.2. Menganalisis dampak strategi Greenpeace terhadap isu deforestasi hutan di Papua

### **1.5. Manfaat Penelitian**

- 1.5.1. Memperkaya penelitian HI terkait isu lingkungan Global terkhusus isu deforestasi hutan di Indonesia
- 1.5.2. Dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan terkait pelestarian lingkungan Hutan di Indonesia

### **1.6. Kerangka Konseptual**

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penulis menggunakan konsep peran NGO (Non-Governmental Organization) dan

konsep Deforestasi yang ada dalam studi Ilmu Hubungan Internasional sebagai pisau analisis untuk dapat memahami dan menyelesaikan rumusan masalah yang telah ditetapkan

#### 1.6.1. Peran NGO (Non-Governmental Organization)

Di era globalisasi hubungan internasional tidak lagi di monopoli oleh hubungan antarnegara. Banyak aktor non negara yang muncul, dan NGO merupakan salah satu diantara aktor-aktor yang di maksud (Sefriani, 2016). Sejak tahun 1945 bersama dengan organisasi-organisasi regional, jumlah dan kiprah NGO semakin membesar. Red Cross, Amnesty Internasional, Greenpeace, World Vision, Save The Children adalah beberapa contoh kecil dari NGO-NGO tersebut. NGO adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan berada di luar struktur pemerintah, namun memiliki fungsi kontrol, fasilitator dan juga menjadi mitra pemerintah dan melakukan advokasi atas persoalan-persoalan sosial-politik dan pembangunan. NGO sendiri memiliki definisi yang bervariasi, hal ini dikarenakan bentuk NGO yang juga bermacam-macam mulai dari kecil hingga besar dan juga informal dan formal.

Menurut David Lewis NGO merupakan organisasi-organisasi “*voluntary associations*” yang memiliki kepedulian untuk mengubah lingkungan sosial masyarakat tertentu dalam konteks yang lebih baik

(Lewis, 2001). NGO merupakan organisasi yang sangat penting dengan sejarah yang panjang. NGO juga merupakan organisasi yang tidak didirikan oleh negara dan independen dari negara, tetapi sangat penting bagi negara. Kegiatannya mendukung kepentingan masyarakat, meringankan penderitaan dan mengatasi masalah sosial tertentu di bidang pelayanan sosial dan kesehatan, waktu luang kegiatan, budaya dan seni, pendidikan dan penelitian, ekologi, dll. Pada umumnya NGO beroperasi di bidang yang menurut pemerintah tidak mendesak yang pada kenyataannya sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada bidang yang menjadi fokus kebijakan pemerintah. Tujuan utama NGO bukanlah mencari keuntungan, tetapi untuk mencapai manfaat langsung untuk masyarakat yang lebih baik.

David Lewis juga mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *The Management of Non-Governmental Development Organization*, bahwa peran Non-Governmental Organization dapat dianalisis melalui sudut pandang organisasi. Melalui sudut pandang tersebut NGO dapat diambil 3 poin yang menjelaskan bagaimana peran NGO yang sebenarnya. Pengertian peran NGO yang dipaparkan oleh David Lewis ini dibedakan menjadi 3 jenis, yang pada proses pelaksanaannya dapat saling tumpang tindih ataupun bisa berdiri sendiri dan tidak terakomodir secara keseluruhan, bahkan dapat dilakukan secara bergantian

tergantung dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang di hadapi (Ebrahim & Weisbend, 2007).

Peran NGO yang pertama dipaparkan adalah *implementers*, dimana hal ini dijelaskan sebagai penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa, baik sebagai program NGO tersebut atau diberikan kepada pihak pemerintah ataupun pihak pendonor (Ebrahim & Weisbend, 2007). Dalam memberikan program, NGO dapat bertindak sesuai program mereka masing-masing, ataupun sesuai perjanjian dengan pihak yang bekerjasama seperti pemerintah dan pendonor, bahkan apa yang dilakukan NGO bisa tidak selalu menysasar pihak yang bekerjasama dengan mereka, namun bisa juga hal lain ataupun faktor lain yang dapat membantu terwujudnya tujuan yang telah disepakati, seperti mengadakan pelatihan atau penelitian kepada masyarakat, bidang swasta ataupun pemerintah (Ebrahim & Weisbend, 2007).

Peran NGO kedua adalah *catalysts*. Peran ini dijelaskan di mana NGO memiliki kemampuan menginspirasi, memfasilitasi, atau berkontribusi pada pemikiran yang lebih baik dan aksi untuk mempromosikan perubahan sosial yang lebih baik. Upaya ini dapat diarahkan pada individu atau kelompok dalam masyarakat lokal, atau di antara aktor-aktor lain dalam pembangunan seperti pemerintah, swasta

atau pendonor (Lewis, 2016). Dalam penerapan peran *catalysts* ini, semuanya dimulai dari tingkat masyarakat, dimana NGO pada umumnya membawa istilah *empowering* terhadap pihak yang bekerjasama atau sasaran program mereka. Istilah *empowering* tersebut jugadapat memiliki arti sebagai perubahan dalam pola pikir, atau hanya sekedar *self-improvement* yang dilakukan oleh masyarakat. Inti dari aksi dalam peran NGO sebagai *catalysts* adalah mencapai tujuan yang lebih luas melalui inovasi dan kebijakan kewiraswastaan.

Peran ketiga yang disebutkan oleh David Lewis adalah *Partners*. Peran ini dijelaskan sebagai kemampuan untuk dapat memprediksi kemungkinan- kemungkinan bekerja sama dengan pihak lain, mulai dari pihak pemerintah, pendonor, ataupun sektor swasta, dalam konteks untuk mencapai kepentingan NGO yang utama. Dalam menjalani kerjasama ini diharapkan dapat menghindari ketergantungan antar kedua belah pihak, atau tujuan-tujuan yang tidak tercapai. Peran *Partners* juga menunjukkan tren yang berkembang bagi NGO untuk bekerja sama dengan pihak yang telah dibutuhkan melalui kegiatan bersama, yang mana NGO dapat memberikan masukan spesifik dalam program atau multi proyek multi-lembaga yang lebih leluasa, atau usaha inisiatif bisnis bertanggung jawab secara sosial. Retorika kebijakan saat

ini tentang peran *Partners* yaitu berusaha membawa NGO kedalam hubungan yang saling menguntungkan dengan sektor-sektor lain.

Dengan melihat tiga klasifikasi peran NGO yang di paparkan oleh David Lewis dalam bukunya dapat diambil kesimpulan bahwa NGO memiliki kecenderungan untuk menggunakan sistem yang berkelanjutan dan fokus pada gerakan bersama dengan menggandeng dan memberdayakan pihak lain yang dianggap dapat berpengaruh dalam penyelesaian isu terkait.

Penggunaan konsep ini dapat dijelaskan dalam aksi yang dilakukan oleh Greenpeace untuk mencapai visi-misinya di Indonesia. Peran *Implementers* dijelaskan dalam gerakan Greenpeace dalam menghasilkan data-data mengenai hutan yang dieksploitasi di Papua. Selanjutnya peran *Catalyst* yang dapat dijelaskan dalam upaya Greenpeace untuk menyadarkan masyarakat Papua terutama di wilayah hutan yang dieksploitasi bagaimana dampak eksploitasi dapat berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidup masyarakat, yang nantinya dapat menginspirasi, memfasilitasi, dan berkontribusi bersama masyarakat demi lingkungan hidup yang lebih baik dan berkelanjutan. Peran *Partners* sebagai peran ketiga dapat dijelaskan melalui aksi Greenpeace yang bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan salah satu kampanye mereka.

Dikarenakan bagaimana metode Greenpeace melaksanakan perannya inilah digunakan konsep peran NGO yang dikemukakan oleh David Lewis untuk menjadi pisau bedah dalam menganalisis variabel peran Greenpeace dalam judul penelitian oleh penulis.

#### 1.6.2. Konsep Deforestasi

Konsep deforestasi sebagai mata pisau kedua yang akan dipakai oleh penulis merupakan konsep dalam hubungan internasional yang muncul untuk mengidentifikasi isu lingkungan yang terjadi, terutama isu deforestasi hutan yang menjadi pusat penelitian oleh penulis.

Untuk memahami konsep deforestasi ada baiknya untuk terlebih dahulu memahami konsep hutan itu sendiri. Hutan memiliki kriteria umum seperti, luas minimum, tinggi minimum pohon, tutupan kanopi minimum, dan penggunaan lahan. Kriteria terakhir mengacu pada penggunaan non-hutan, seperti pertanian atau daerah perkotaan. Lahan yang dikonversi dari hutan ke penggunaan non-hutan tidak dapat lagi didefinisikan sebagai hutan dan keluar dari klasifikasinya.

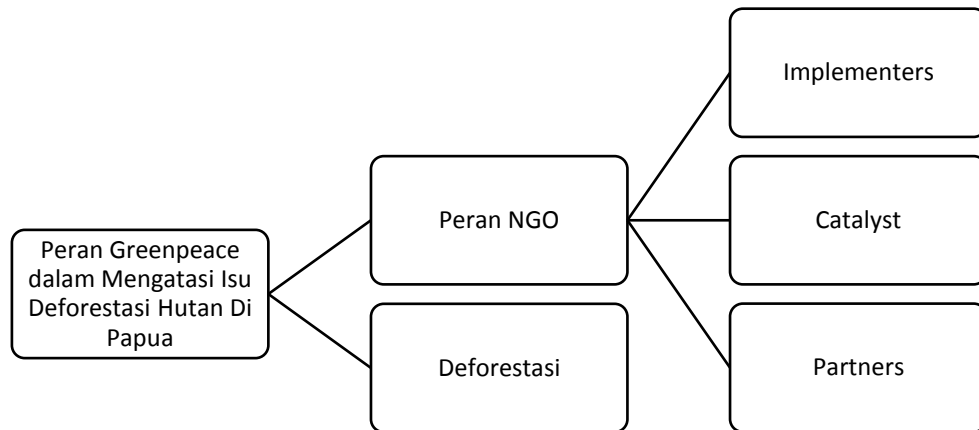
Dengan demikian, konsep deforestasi mempunyai dua aspek utama berdasarkan bagaimana konsep hutan didefinisikan dan diukur. Deforestasi pada dasarnya merupakan perubahan hutan. Food and Agricultural Organization (FAO) mendefinisikan deforestasi sebagai pengurangan jangka Panjang wilayah tutupan hutan dibawah batas



minimum 10 persen. Seperti disebutkan diatas, perubahan penggunaan lahan dari hutan ke penggunaan non-hutan dihitung sebagai deforestasi. Namun, penebangan pohon sementara di mana hutan diharapkan dapat beregenerasi tidak dianggap sebagai deforestasi (FAO, 2020).

Deforestasi bukan hanya menjadi isu lingkungan namun juga telah menjadi isu multi sosial-ekonomi-demografi, dan sekarang telah dimasukkan dalam agenda politik global. Dalam pembagian dampaknya, deforestasi terbagi menjadi dua yaitu: **a.** Deforestasi level mikro, yang terasosiasikan dengan kebakaran, pengikisan tanah, kerusakan daerah aliran sungai, dan perubahan iklim mikro. **b.** Deforestasi level global, yang dapat memberikan dampak negatif secara global, contohnya : pasokan kayu, ketidakseimbangan hidrologi, kerusakan keanekaragaman hayati, siklus global elemen substansial, emisi karbon secara besar (Indarto et al., 2016).

Di Indonesia, deforestasi terus terjadi dari tahun ketahun yang menyebabkan berkurangnya wilayah tutupan hutan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan perubahan wilayah tutupan hutan yang sangat dinamis dan berdampak negatif inilah Greenpeace berusaha melakukan beragam kampanye untuk menyadarkan pemerintah dan masyarakat akan deforestasi yang terus terjadi.



**Tabel 1.2 Bagan Kerangka Konseptual**

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya, maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatif. Metode ini bertujuan untuk memberikan eksplanasi analisis dengan menjelaskan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan tentang bagaimana peran Greenpeace dalam mengatasi isu deforestasi hutan yang terjadi di Papua terkhusus untuk hutan di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke.

### 1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah Pustaka (*library research*). *Library research* dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan kemudian dianalisis oleh penulis. Sumber literatur utamanya

berasal dari buku, arsip dan juga dokumen-dokumen, artikel, jurnal, makalah, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan Strategi Greenpeace dalam mengatasi isu deforestasi hutan di Papua.

#### 1.7.3. Jenis Data

Jenis data yang akan penulis gunakan adalah data teoritis, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang selanjutnya akan dianalisis, dan dengan data-data yang penulis peroleh ini akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu bagaimana strategi Greenpeace dalam mengatasi isu deforestasi hutan di Papua dan juga dampaknya kepada dunia luar.

#### 1.7.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasar pada fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

#### 1.7.5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis akan gunakan adalah metode deduktif, dimana penulis terlebih dahulu akan menggambarkan permasalahan secara umum, lalu kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang

diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian mengenai peran Greenpeace dalam mengatasi isu deforestasi hutan di Papua.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Peran NGO**

Non-Governmental Organization (NGO) dalam ilmu hubungan internasional dikenal sebagai aktor penting dalam pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan hidup dan juga bidang aksi publik lainnya. Dalam melakukan aksinya NGO mempunyai dua tipe yang berbeda yaitu sebagai penyedia jasa bagi masyarakat yang membutuhkan dan Lembaga advokasi kebijakan dan kampanye public dengan tujuan untuk perubahan sosial (Lewis, 2016).

NGO telah ada dan berkembang selama berabad-abad namun puncaknya dimulai pada tahun 1980-an dan 1990-an. Sejak itu telah banyak organisasi formal dan informal NGO terbentuk yang jumlahnya berkisar milyaran. Namun berdasarkan daftar resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), NGO saat ini berjumlah 5.451 dan bernaung di bawah PBB. Bantuan pembangunan resmi yang diberikan melalui NGO telah meningkat dari 4,6 persen pada tahun 1995 menjadi 13 persen di tahun 2014, dengan total bantuan yang meningkat dari 59 Dollar Amerika hingga 78.6 triliun Dollar Amerika dalam periode yang sama (Hamilton et al., 2010).

Peran yang dilakukan oleh NGO untuk melaksanakan aksinya sangat beragam, namun dalam bukunya *The Management of Non-Governmental*

*Development Organizations: An Introduction*, David Lewis mengelompokan peran NGO menjadi tiga bagian. Tiga peran ini yaitu *Implementers*, *Catalysts*, dan *Partners*.

#### 2.1.1. *Impelementers*

NGO sebagai *Implementers*, yang dimaksud oleh David Lewis adalah organisasi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa. Peran ini dapat diamati secara langsung dan terlihat Ketika organisasi tersebut menyediakan barang dan jasa yang diinginkan, dibutuhkan atau yang tidak tersedia. Sebuah organisasi dapat memberikan pelayanan kepada kliennya melalui programnya sendiri, atau dengan memberikan “jalan” ke layanan yang disediakan oleh pemerintah, atau donor individual yang menyediakan layanan dalam struktur proyek. Seiring berjalannya waktu NGO tidak hanya memberikan layanan kepada kelompok sasaran atau klien mereka, tetapi juga dapat memberikan layanan seperti pelatihan atau penelitian kepada NGO lain, pemerintah, atau badan swasta. Sejak akhir 1980-an, NGO telah dibawa ke dalam program penyesuaian struktural Bank Dunia untuk menyediakan “jaringan pengamanan” sosial bagi populasi yang rentan.

Dalam bukunya David Lewis menyatakan bahwa peran implementasi cenderung diremehkan oleh beberapa ahli dikarenakan peran ini dianggap jauh dari cita-cita NGO yang kreatif dan berorientasi.

Peran ini juga memberikan kesan bahwa NGO menjadi lebih dekat dengan bisnis sektor swasta, dan oleh karena itu berisiko dijauhkan dari tujuan awalnya yang lebih luas dan didorong oleh nilai yang berfokus pada pelayanan.

Namun, bagi banyak NGO implementasi dan pemberian layanan merupakan peran yang sangat penting dalam rangka menjangkau masyarakat atau klien rentan yang tidak terjangkau dan sering tidak dipedulikan oleh pemerintah. NGO juga dapat terus memperkuat sistem penyampaian yang lebih luas melalui pelatihan, penelitian dan inovasi, khususnya staf pemerintah yang keterampilan dan pandangannya dapat ditingkatkan melalui NGO sebagai jembatan dengan masyarakat yang membutuhkan.

Dalam menjalankan perannya sebagai *Implementers* NGO juga mempunyai masalah utama yang dapat menghambat kinerja NGO dalam jangka Panjang. Di dunia Organisasi yang plural, pertumbuhan NGO meningkatkan pilihan yang mana akan memperluas jangkauan potensi sosial bagi Lembaga yang bersifat otonom yang ada dalam masyarakat terbuka. Tantangannya adalah bagi NGO untuk mencapai tingkat akuntabilitas dan kinerja yang sebanding dengan negara dan sektor swasta. Selain itu kekhawatiran akan potensi NGO yang kurang dimanfaatkan juga ada. Hal ini dikarenakan Ketika NGO menyediakan

kualitas layanan yang tinggi, Sebagian besar NGO cenderung memberikan penyediaan yang terbatas, sedikit demi sedikit atau tidak merata yang tidak akan pernah bisa bersaing dengan negara dalam hal cakupan.

#### 2.1.2. Catalysts

Peran NGO sebagai *Catalysts* merupakan peran yang di mulai di tingkat masyarakat, yaitu dengan tujuan untuk “pemberdayaan” masyarakat. Dalam bukunya David Lewis menyatakan definisi “pemberdayaan” dimana memiliki banyak arti, mulai dari pengertian transformatif radikal di mana gagasan Pendidikan Freire telah diadaptasi oleh banyak NGO hingga pengertian “perbaikan diri” pribadi yang digunakan di negara-negara seperti Amerika Serikat, dan masih banyak lagi pengertian lain.

Melihat bagaimana istilah ini selalu diperhatikan dari segi proses yang mencakup kesadaran akan dinamika kekuatan dalam kehidupan seseorang, mengembangkan keterampilan dan kapasitas untuk kontrol yang lebih besar, melakukan kontrol tanpa melanggar hak orang lain dan NGO dan juga pengembangan yang mendukung pemberdayaan orang lain dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, proses pemberdayaan melibatkan perpindahan dari wawasan ke tindakan dan dari tindakan individu ke tindakan kolektif.



Selain melalui pendekatan di atas yang masih dianggap radikal oleh beberapa pihak, beberapa NGO juga menggunakan pendekatan yang lebih berbasis pasar, yang menekankan pemberdayaan melalui kegiatan ekonomi serta melalui keaktifan politik. Dengan ini NGO dianggap sebagai aktor yang dapat menghubungkan aksi lokal kembali ke dalam perubahan nasional dan struktural.

Dengan ini membawa kita kedalam peran kunci NGO lainnya sebagai katalis – yaitu advokasi. Pada pertengahan tahun 1990-an, advokasi telah diakui secara luas sebagai kegiatan NGO yang penting untuk mencapai tujuannya yang berkelanjutan, dan NGO mulai melihat advokasi sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas dan dampaknya, dan sebagai strategi potensial untuk terus melaju sesuai tujuan NGO tersebut.

Bagi beberapa NGO, advokasi dapat menjadi tantangan baru bagi organisasi. Nilai efektivitas advokasi tidak hanya dalam hal mencapai dampak kebijakan yang diinginkan, tetapi juga dalam hal proses itu sendiri, yang dipandang dapat memberikan kontribusi menuju masyarakat yang sejahtera. Namun hal ini dapat diatasi jika NGO dapat menyeimbangi kekuatan dalam aliansi multi-organisasi dengan memainkan peran sebagai “jembatan” yang menghubungkan

masyarakat ke tingkat nasional atau internasional, dan berbagai jenis organisasi.

### 2.1.3. *Partners*

Dalam konteks kebijakan dan praktik pembangunan internasional, konsep *Partners* semakin sering digunakan di kalangan pembuat kebijakan dan praktisi. Menurut World Bank dalam laporan dengan judul “*Pursuing Common Goals*” kerjasama antara NGO dan pemerintah sangat dianjurkan.

Sebagian besar minat dalam kemitraan di tahun 1990-an adalah upaya membangun hubungan antara pekerjaan lembaga pemerintah dan NGO dalam proyek-proyek pembangunan. Dalam bukunya David Lewis menyatakan bahwa kerjasama antara pemerintah dan NGO perlu menjangkau kesenjangan budaya, kekuasaan, sumber daya dari berbagai perspektif jika mereka ingin berhasil.

Secara luas, penciptaan kemitraan dipandang sebagai cara untuk memanfaatkan sumber daya yang langka secara lebih efisien, meningkatkan keberlanjutan organisasi, dan meningkatkan partisipasi penerima manfaat. Pada tingkat yang lebih umum, menciptakan hubungan antara lembaga pemerintah dan NGO mungkin berimplikasi pada penguatan transparansi dalam administrasi dan menantang budaya

kelembagaan top-down yang berlaku, yang keduanya dapat berkontribusi pada penguatan “masyarakat sipil” yang lebih luas.

Kemitraan atau kerjasama NGO tidak hanya terbatas pada lembaga pemerintah namun juga aktor internasional lain seperti NGO lainnya, perusahaan swasta, organisasi internasional, media massa dan juga individu. Sebuah proyek yang melibatkan kemitraan cenderung memiliki berbagai hubungan antar-lembaga di berbagai tingkatan. Penggunaan kata “kemitraan” mencakup berbagai hubungan yang berbeda antara lembaga yang mungkin memiliki karakter aktif, pasif dan bergantung.

Asal usul kemitraan (seperti paksaan, kesepakatan atau insentif keuangan) dapat menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan dan dapat membatasi ruang lingkup untuk pemantauan proses selanjutnya. Kemitraan juga membutuhkan biaya tambahan yang mudah diremehkan, seperti jalur komunikasi baru yang membutuhkan waktu, kendaraan, telepon, tanggung jawab untuk staf tertentu, dan kebutuhan untuk berbagi informasi dengan lembaga lain. Oleh karena itu, membangun kemitraan adalah hal yang tidak mudah.

Dengan melakukan kemitraan tentu saja dapat memudahkan NGO dalam melakukan proyek, seperti dalam hal mengakses sumber daya yang dibutuhkan dan juga membagi tanggung jawab dengan mitra

kerja sama. Namun hal ini tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang jika aktor yang terlibat dalam proyek memiliki agenda tersendiri yang biasanya sering terjadi (Lewis, 2001).

## **2.2. Konsep Deforestasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deforestasi diartikan sebagai penebangan hutan, dan berdasarkan laporan Food and Agricultural Organization (FAO), badan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur mengenai sumber daya pangan dan kehutanan, Deforestasi adalah konversi hutan menjadi penggunaan lahan lain (terlepas dari apakah itu disebabkan oleh manusia) (FAO, 2020). Dalam peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NO. P.30/Menhut II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan yang dengan tegas menyebutkan bahwa defoestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Deforestasi melibatkan berbagai faktor yang tidak hanya mencakup aspek lingkungan tetapi juga sosial, ekonomi, demografi, dan aspek politik. Mereka terjalin satu sama lain dalam interaksi non linier yang begitu kompleks. Para ahli telah mencoba memahami kompleksitas itu dengan mengembangkan klasifikasi variabel yang dikaitkan dengan deforestasi, yang biasanya dikelompokkan menjadi dua: penyebab langsung dan penyebab tidak langsung.

Secara umum, hilangnya tutupan lahan disebabkan kegiatan pengalihan fungsi hutan untuk keperluan lainnya. Jumlah manusia yang semakin bertambah dapat menyebabkan diperlukannya lahan untuk permukiman. Saat ini, luas permukiman yang dibangun harus dibarengi dengan pembangunan ruang terbuka hijau agar dapat terjaganya fungsi sebagai sistem sirkulasi udara. Namun fungsi hutan yang kompleks tidak dengan mudah digantikan dengan ruang terbuka hijau lainnya.

Populasi manusia yang semakin meningkat saat ini menyebabkan terjadinya permintaan terhadap pangan yang semakin tinggi. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan membuka lahan pertanian baru. Sebagai contohnya, Brasil membuka kebun-kebun kedelai baru dan gula secara masif dengan melakukan penebangan pada tegakan-tegakan hutan yang ada. Pengalih fungsian hutan sebagai kebun kelapa sawit juga menyebabkan hilangnya tutupan lahan.

Kebutuhan hidup manusia akan produk kayu pun dapat meningkatkan laju deforestasi. Faktor utama dalam kejadian hilangnya tutupan hutan adalah kegiatan industri, terutama industri kayu. Pemanenan kayu dari pohon sudah diatur untuk melakukan penanaman kembali setelahnya. Namun, adanya *illegal logging* yang terjadi masih menjadi masalah serius. Penebangan liar secara besar-besaran masih terjadi di hutan hujan tropis, khususnya Brasil, Kongo, dan Indonesia. Kejadian alam juga dapat menyebabkan terjadinya deforestasi.

Radiasi matahari yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat gesekan daun-daun terhadap tanah kering di bawahnya.

Deforestasi akibat kebakaran hutan, saat ini lebih banyak dibandingkan deforestasi akibat pengalihan fungsi pertanian dan *illegal logging* jika disatukan. Kerugian yang ditimbulkan juga sangat besar karena hilangnya plasma nutfah dan mendatangkan ancaman langsung bagi manusia, seperti gangguan kesehatan, kehilangan materi, dan jiwa.

Pembakaran masif dilakukan oleh petani untuk membuka lahan yang akan digunakan untuk bertani juga dilakukan dengan cara membakar hutan. Cara tersebut dipakai karena lebih cepat dan mudah jika dibandingkan dengan menebang pohon. Akibat pembakaran tersebut, karbon akan semakin banyak dilepaskan ke udara. Tidak adanya hutan sebagai pengikat karbon dapat mengakibatkan meningkatnya suhu dan berpengaruh terhadap iklim.

Untuk memahami konsep deforestasi yang merupakan isu multi-sektor studi empiris telah dieksplorasi dan diteliti untuk menjelaskan bagaimana deforestasi terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan kebijakan apa yang dapat disarankan untuk mengatasi masalah ini. Deforestasi juga merupakan studi teoritis yang menggugah, dengan fokus pada bagaimana kompleksitas deforestasi dapat dijelaskan dan sejauh mana deforestasi akan terjadi.

Dengan alasan ini akan digunakan teori Transisi Hutan, teori ini diperkenalkan oleh A.S Mather. Awalnya, ia mengembangkan ide ini berdasarkan urutan dasar perusakan dan konservasi sumber daya alam atau model deplesi-meliorasi yang diusulkan oleh Whitaker dan Friedrich. Model ini berpendapat bahwa, pada tahap awal, perusakan sumber daya alam tidak dapat dihindari untuk memenuhi kebutuhan manusia. Meningkatnya permintaan dan harga sumber daya alam akan mendorong orang untuk melestarikan dan memulihkan sumber daya alam mereka.

Teori transisi hutan lebih berfokus pada perubahan temporal tutupan hutan dan perubahan tren tutupan hutan dari waktu ke waktu. Pendekatan teori ini mampu menjelaskan sejauh mana dua isu penting, tutupan hutan dan deforestasi dari waktu ke waktu. Dengan demikian pembuat kebijakan dapat memperoleh beberapa alternatif kebijakan dari teori ini.

Secara umum, dua arah kebijakan utama dapat diturunkan, yaitu kebijakan untuk menghentikan deforestasi dan kebijakan untuk mempercepat transisi menuju peningkatan tutupan hutan. Dengan demikian beberapa kebijakan dapat dilaksanakan yang secara implisit tertanam di setiap peraturan yang ada (Indarto et al., 2016).

### **2.3. *Literature Review***

Untuk membantu penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan yang sama. Penelitian pertama jurnal berjudul Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara Dan Air) di China ditulis oleh Dori Gusman Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau. Penelitian tersebut berfokus pada peranan Greenpeace dalam penanganan kerusakan lingkungan yang terjadi di China, dengan membuktikan peran Greenpeace dalam mengatasi masalah udara dan polusi di China. Penelitian dilakukan dengan metode Deskriptif Analitik, lalu mengolah data-data yang diperoleh menggunakan teori dan konsep yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh kemajuan dan industrialisasi China membawa dampak buruk terhadap sektor lingkungan di wilayah tersebut dan juga menunjukkan adanya indikasi kepentingan Greenpeace di China (Gusman & Joko Waluyo, 2014).

Penelitian kedua merupakan jurnal berjudul Upaya Greenpeace dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, ditulis oleh Bella Putri mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau. Penelitian ini berfokus pada upaya Greenpeace dalam menangani kerusakan lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, melalui beberapa strategi yang cocok untuk mengatasi isu kerusakan lingkungan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan



mnggunakan data dari studi kepustakaan, lalu diolah menggunakan Perspektif Konstruktisme, Analisis Tingkat Organisasi Kelompok, Teori Organisasi Internasional dan Konsep Keamanan Lingkungan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan upaya-upaya Greenpeace untuk menangani kerusakan lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yaitu, “Kampanye Hutan Tanpa Kebakaran”, meluncurkan program Interactive Map Kepo Hutan, Tiger Challenge, membentuk Tim Pencegah Kebakaran, meluncurkan toolkit pendekatan High Stock Carbon (HSC), dan kemitraan Grenpeace dengan pemerintah (Putri, 2019).

Penelitian ketiga merupakan jurnal dengan judul Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar, yang ditulis oleh Muhammad Arief Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Padjajaran. Penelitian ini berfokus pada strategi Greenpeace terkait isu deforestasi hutan di Indonesia yang di sebabkan oleh Wilmar melalui pembentukan jaringan advokasi internasional hingga dapat menekan Wilmar International untuk mengubah perilaku mereka yang menimbulkan kerusakan lingkungan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Greenpeace Indonesia menggunakan empat strategi yaitu *Information Politics*, *Leverage Politics*, *Symbolic Politics* dan *Acountability Politics*. Selain itu penelitian ini

juga menunjukkan metode Greenpeace yang kreatif dan konfrontatif melalui strategi ini namun juga memiliki kelemahan tersendiri bagi Greenpeace Indonesia (Arief et al., 2020).

Penelitian keempat merupakan skripsi berjudul Peran Greenpeace dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia oleh Sawalidaini Br Simanjuntak, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini berfokus pada strategi Greenpeace dalam menjalankan perannya sebagai Organisasi peduli lingkungan dalam menangani kerusakan lingkungan di Australia dalam kurun waktu yang telah ditentukan peneliti yaitu 2019 sampai 2020. Menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan didukung dengan data-data yang telah diperoleh dan diolah dengan teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Greenpeace antara lain adalah : memberikan atau menyalurkan donasi, melakukan kampanye, mengekspos perusahaan pencemar iklim terbesar (AGL), mengirim petisi, dan menerbitkan laporan *Dirty Power Burn* (Simanjuntak & Mahrawa, 2021).

**Tabel 2.1 Literature Review**

| Tahun | Jenis Penelitian                       | Judul   |
|-------|--|---|
| 2014  | Jurnal oleh Dori Gusman                | Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara Dan Air) di China                            |
| 2019  | Jurnal oleh Bella Putri                | Upaya Greenpeace dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia                |
| 2020  | Jurnal oleh Muhammad Arief             | Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar |
| 2021  | Jurnal oleh Sawalidaini Br Simanjuntak | Peran Greenpeace dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia                |

Pengelompokan penelitian diatas menunjukkan adanya kesamaan dalam objek kajian yang juga akan diteliti pada penelitian ini. Namun tentu saja akan ada perbedaan mendasar yang mengacu pada strategi Greenpeace dalam menjalankan perannya untuk mengatasi isu deforestasi hutan di Papua serta pemilihan sampel penelitian berupa dua kawasan hutan di Papua berupa Hutan di Kabupaten Merauke dan hutan di Kabupaten Boven Digoel. Penelitian ini

akan menggunakan pendekatan Peran NGO dan Konsep Deforestasi sebagai kerangka konseptual dan akan dikaji dengan metode deskriptif eksplanatif dengan data yang diperoleh melalui teknik studi pustaka (*Library Research*).

## **BAB III**

### **GREENPEACE DAN PERMASALAHAN HUTAN DI PAPUA**

#### **3.1. Sejarah Greenpeace**

Pada tahun 1971, sekelompok aktivis lingkungan di Vancouver berangkat untuk memprotes uji coba nuklir AS di Kepulauan Aleutian yang terpencil di Pasifik Utara. Greenpeace, begitu mereka akhirnya menyebut gerakan mereka, terdiri dari orang Amerika dan Kanada, peacenik dan hippie, veteran Perang Dunia II dan orang-orang yang hampir tidak lulus sekolah menengah. Dalam waktu kurang dari satu dekade, Greenpeace akan menjadi LSM lingkungan terbesar di dunia, dengan kantor pusat di Amsterdam, cabang di puluhan negara, dan kehadiran reguler di pertemuan lingkungan internasional di seluruh dunia.

Pengaruh Greenpeace sebagian besar berasal dari keterlibatannya dengan apa yang disebut oleh ilmuwan politik Paul Wapner (1996) sebagai “politik sipil dunia”, yang dalam hal ini melibatkan penyebaran kepekaan ekologis yang secara tidak langsung membentuk perilaku pada berbagai skala. Taktik Greenpeace dan isu-isu yang dipilihnya untuk dikampanyekan memerlukan strategi multi-cabang dan saling terkait yang dapat memengaruhi opini di berbagai tingkat politik, dari komunitas kecil hingga badan pemerintahan multilateral dan negara bangsa yang kuat. Dalam proses mencoba mengembangkan stabilitas politik, Greenpeace sendiri menjadi LSM multi-